



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 612 TAHUN 2022

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEWENANGAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi yang memiliki kriteria efektif, efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
 - b. bahwa dengan adanya Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan administrasi pemerintahan diharapkan dapat berjalan dengan pasti dan menghindari berbagai bentuk penyimpangan untuk memberikan kualitas pelayanan publik yang lebih baik;
 - c. Bahwa dengan adanya perubahan kewenangan dalam penerbitan izin, maka perlu adanya dukungan regulasi yang mengatur persyaratan operasional prosedur perizinan serta standar waktu pelayanan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Standar Operasional Prosedur Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

8. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 41);
9. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 16);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Standar Operasional Prosedur Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin.
- KEDUA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Oktober 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 612 TAHUN 2022
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN

1. Daftar Dokumen Standar Operasional Prosedur Management Representative (MR)

No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1	065/24.01/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengendalian Dokumen Internal
2	065/24.02/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengendalian Dokumen Eksternal
3	065/24.03/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengendalian Arsip
4	065/24.04/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Audit Internal
5	065/24.05/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Tinjauan Manajemen
6	065/24.06/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Tindakan Perbaikan
7	065/24.07/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengendalian Hasil Yang Tidak Sesuai
8	065/24.08/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Analisa Resiko
9	065/24.09/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengawasan Rutin Kegiatan Berusaha Bidang A, B dan C

2. Daftar Dokumen Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1	065/24.10/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Surat Masuk dan Pengarsipan
2	065/24.11/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Administrasi Surat Keluar dan Pengarsipan
3	065/24.12/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Jaminan Jasa Pemeliharaan Kesehatan PNS/Askes
4	065/24.13/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pembuatan Karpeg, Karsu/Karis dan Kartu askes Pegawai
5	065/24.14/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Pemutakhiran Data Pegawai

5. Daftar Dokumen Standar Operasional Prosedur Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan A

No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1	065/24.35/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Penataan Ruang Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
2	065/24.36/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Penataan Ruang - Izin Reklame (termasuk Pemasangan spanduk, Umbul-umbul dan Banner)
3	065/24.37/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Penataan Ruang - Pengesahan Rencana Tapak (Site Plan)
4	065/24.38/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Penataan Ruang - Sertifikat Lai Fungsi (SLF)
5	065/24.39/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Penataan Ruang - Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas
6	065/24.40/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perhubungan- OSS Kategori Menengah Tinggi
7	065/24.41/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perhubungan- OSS Kategori Menengah Rendah
8	065/24.42/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Lingkungan Hidup - OSS Kategori Rendah
9	065/24.43/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Lingkungan Hidup - OSS Kategori Menengah Rendah
10	065/24.44/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Lingkungan Hidup - OSS Kategori Menengah Tinggi
11	065/24.45/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Lingkungan Hidup - OSS Kategori Tinggi
12	065/24.46/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Telekomunikasi - OSS Kategori Rendah
13	065/24.47/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Telekomunikasi - OSS Kategori Menengah Rendah
14	065/24.48/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Telekomunikasi - OSS Kategori Menengah Tinggi
15	065/24.49/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Telekomunikasi - OSS Kategori Tinggi

6. Daftar Dokumen Standar Operasional Prosedur Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan B

No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1	065/24.50/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan - OSS dan Manual
2	065/24.51/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pendidikan - Manual
3	065/24.52/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Ketenagakerjaan - OSS Kategori Menengah Tinggi
4	065/24.53/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Ketenagakerjaan - Izin tempat Penampungan Pekerja Migran Indonesia
5	065/24.54/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - OSS Kategori Tinggi
6	065/24.55/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pariwisata - OSS Kategori Rendah
7	065/24.56/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Pariwisata - OSS Kategori Menengah Rendah
8	065/24.57/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Peternakan - izin Praktik Dokter Hewan
9	065/24.58/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Peternakan - OSS Kategori Rendah
10	065/24.59/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perdagangan - OSS Kategori Rendah
11	065/24.60/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Perdagangan - OSS / PBUMKU Tanda Daftar Gudang
12	065/24.61/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Industri - OSS Kategori Rendah
13	065/24.62/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Industri - OSS Kategori Menengah Rendah
14	065/24.63/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Industri - OSS Kategori Menengah Tinggi
15	065/24.64/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Industri - OSS Kategori Tinggi
16	065/24.65/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik - Izin Pelaksanaan Pendataan / Penelitian / Survei
17	065/24.66/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik - Surat Keterangan Terdaftar untuk Ormas dan LSM
18	065/24.67/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik - Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Ibadah oleh FKUB
19	065/24.68/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik - Izin Pemasangan Atribut Partai Politik

7. Daftar Dokumen Standar Operasional Prosedur Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan C

1	065/24.69/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan - Manual
2	065/24.70/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan - OSS Kategori Rendah
3	065/24.71/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan - OSS Kategori Menengah Rendah
4	065/24.72/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan - OSS Kategori Menengah Tinggi
5	065/24.73/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan - OSS Kategori Tinggi
6	065/24.74/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Izin Bidang Kesehatan - OSS / PBUMKU Sertifikat Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT)

8. Daftar Dokumen Standar Operasional Prosedur Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1	065/24.75/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Perencanaan Kegiatan Promosi Potensi Daerah
2	065/24.76/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Kegiatan Promosi Potensi Daerah
3	065/24.77/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Kegiatan Monitoring Perusahaan Bidang Penanaman Modal
4	065/24.78/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengawasan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

9. Daftar Dokumen Standar Operasional Prosedur Bidang Program Pengelolaan Data dan Informasi

No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1	065/24.79/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Data Realisasi Perizinan
2	065/24.80/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Kegiatan pelayanan Informasi Perizinan
3	065/24.81/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Penerimaan Tamu
4	065/24.82/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Front Office
5	065/24.83/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Server
6	065/24.84/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pemeliharaan Jaringan IT
7	065/24.85/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Back Up Data
8	065/24.86/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pemantauan Ketelitian Pemeliharaan Berkas
9	065/24.87/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengembangan dan Inovasi Pelayanan

10. Daftar Dokumen Standar Operasional Prosedur Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan

No.	Nomor Dokumen	Nama Dokumen
1	065/24.88/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
2	065/24.89/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Monitoring dan Evaluasi Pelayanan
3	065/24.90/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Konsultasi Perizinan
4	065/24.91/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengaduan Perizinan
5	065/24.92/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Dokumentasi Pengaduan
6	065/24.93/DPMPTSP/2022	Standar Operasional Prosedur Pengkajian Regulasi

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 612 Tahun 2022
Tentang Standar Operasional Prosedur Kewenangan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin